



Dampak Negatif Migrasi Sirkuler dan Teknologi Komunikasi: Ancaman terhadap Ketahanan dan Dinamika Keluarga di Kabupaten Wonogiri

The Negative Impact of Circular Migration and Communication Technology: Threats to Family Resilience and Dynamics in Wonogiri Regency

Anditya Wiganingrum

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Info Artikel

Diterima : 12 November 2025
Direvisi : 20 April 2026
Disetujui : 2 Juni 2026

Kata kunci:

Bargaining Power
Migrasi Sirkuler
Transnasionalisme

Keywords:

Bargaining Power
Circular Migration
Transnationalism

Corresponding Author :

Anditya Wiganingrum
anditya9118@gmail.com
082225216635

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena kerentanan institusi keluarga migran sirkuler di Kabupaten Wonogiri yang dipicu oleh perubahan struktur relasional meskipun kesejahteraan material meningkat. Dengan menggunakan kerangka teoritis Transnasionalisme dan Analisis Peran Gender, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif untuk menganalisis transformasi keluarga dalam hubungan jarak jauh (*long distance marriage*) yang dimediasi oleh teknologi komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan: (a) migrasi menghasilkan pergeseran peran gender yang signifikan melalui *remittance empowerment* dan meningkatkan otonomi finansial, serta *bargaining power* istri di daerah asal; (b) teknologi komunikasi seperti *video call* dan media sosial berfungsi ganda sebagai instrumen kohesi sekaligus sumber konflik baru yang memicu kecurigaan dan pertengkaran dalam praktik *real-time monitoring*; (c) tingginya angka cerai gugat merupakan manifestasi dari keberanian istri yang berdaya secara finansial untuk mengakhiri pernikahan yang tidak harmonis yang diperparah oleh kegagalan mediasi kelembagaan lokal dalam menangani konflik virtual dan trans-lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga migran di Wonogiri harus diupayakan melalui literasi digital yang beretika dan penguatan mekanisme mediasi trans-lokal, bukan sekadar peningkatan ekonomi.

Abstract

This study examines the vulnerability of circular migrant family institutions in Wonogiri Regency, triggered by changes in relational structures despite increasing material well-being. Using the theoretical framework of Transnationalism and Gender Role Analysis, this study employs an interpretive qualitative approach to analyze family transformation in long-distance marriages mediated by communication technology. The results show that: (a) migration results in significant shifts in gender roles through remittance empowerment, which increases the financial autonomy and bargaining power of wives in their home regions; (b) communication technologies, such as video calls and social media, function both as instruments of cohesion and as sources of new conflict, where real-time monitoring practices trigger

suspicion and arguments; (c) the high rate of divorce lawsuits is a manifestation of the courage of financially empowered wives to end disharmonious marriages, a situation exacerbated by the failure of local institutional mediation in handling virtual and trans-local conflicts. This study concludes that the resilience of migrant families in Wonogiri must be pursued through ethical digital literacy and the strengthening of trans-local mediation mechanisms, rather than mere economic improvement.

PENDAHULUAN

Kabupaten Wonogiri telah lama dikenal sebagai kantong utama migran sirkuler (kaum boro) di Indonesia (Hugo, 2002; Mantra, 2013). Migrasi ini merupakan strategi sosial-ekonomi vital bagi keluarga untuk meningkatkan taraf hidup (De Haas, 2021). Secara makro, remitansi terbukti berhasil merevitalisasi infrastruktur desa dan meningkatkan kesejahteraan material masyarakat (Yulianto & Furqan, 2022; Khoiriyah, 2023). Namun, di balik narasi keberhasilan ekonomi tersebut, terdapat celah penelitian mengenai kerapuhan institusi keluarga akibat pergeseran relasional yang belum banyak disoroti dalam konteks lokal Wonogiri.

Berbagai studi literatur mutakhir menunjukkan bahwa dinamika keluarga migran kini menghadapi tantangan kompleks yang melampaui masalah ekonomi. Penelitian Hadi dan Pratama (2025) mengungkapkan bahwa praktik komunikasi digital dalam *long-distance marriage* sering kali menciptakan beban emosional baru yang memicu konflik interpersonal, yang justru dapat memicu kecurigaan kronis pada frekuensi komunikasi yang tinggi. Fenomena ini diperkuat oleh temuan Rahmawati et al. (2025) yang menyoroti bagaimana praktik digital *surveillance* menjadi sumber utama erosi kepercayaan dalam rumah tangga migran. Selain itu, Sari dan Wijaya (2025) menegaskan bahwa peningkatan otonomi finansial melalui remitansi mengubah struktur kekuasaan di tingkat rumah tangga yang sering kali tidak diantisipasi oleh sistem mediasi tradisional.

Pengadilan Agama Wonogiri 2023 mencatat data 1.647 perkara perceraian, yakni

89% didominasi oleh Cerai Gugat yang diajukan oleh istri dengan alasan perselisihan (PA Wonogiri, 2023; Radar Solo, 2023). Tren ini berlanjut pada periode 2024–2025 sebagaimana terlihat dalam analisis konten pada direktori putusan perkara di situs resmi Mahkamah Agung yang mengonfirmasi bahwa teknologi sering menjadi ruang digital tempat terjadinya pengawasan yang mencederai kepercayaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakharmonisan tidak lagi dipicu oleh kemiskinan, tetapi oleh konflik trans-lokal akibat jarak dan kegagalan mediasi kelembagaan. Isu ini relevan dengan diskursus pembangunan pedesaan yang gagal mengurangi kesenjangan emosional antara desa dan kota (Diah, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap teoretis dan empiris dengan menganalisis secara mendalam bagaimana migrasi sirkuler yang bersifat transnasional, terutama yang dimediasi oleh teknologi komunikasi, mengubah dinamika keluarga di Wonogiri. Studi ini secara spesifik mengeksplorasi dua aspek kunci: (1) Transformasi peran gender dan peningkatan *bargaining power* istri sebagai pengelola remitansi, dan (2) Paradoks teknologi komunikasi sebagai instrumen kohesi sekaligus pemicu konflik digital *surveillance* yang berujung pada perceraian.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, perspektif Transnasionalisme (Levitt & Jaworsky, 2007) untuk memahami keluarga sebagai unit sosial yang tetap terhubung lintas batas. Kedua, Teori Peran Gender (Giddens, 1990; Kartini & Maulana, 2019) untuk menganalisis negosiasi ulang peran suami-istri. Dengan menggabungkan kedua kerangka tersebut, studi ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman komprehensif mengenai kompleksitas ketahanan keluarga migran di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, sekaligus memberikan kontribusi pada literatur sosiologi keluarga migran yang lebih mutakhir.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif (*verstehen*) yang bertujuan untuk menggali pengalaman subjektif dan makna mendalam di balik praktik komunikasi serta keputusan strategis rumah tangga para informan. Desain penelitian yang diaplikasikan adalah studi kasus multi-situs sebagaimana diusulkan oleh Creswell (2014) untuk membedah kerentanan keluarga migran dalam berbagai konteks sosial di tingkat desa. Lokasi penelitian ditetapkan di dua desa yang teridentifikasi sebagai kantong utama migran sirkuler (kaum boro) dengan intensitas migrasi keluar yang tinggi, yakni Desa Kerjo Lor di Kecamatan Ngadirojo dan Desa Pule di Kecamatan Selogiri. Penentuan lokasi menggunakan teknik *purposive selection* dengan mempertimbangkan konsentrasi tinggi keluarga penerima remitansi yang menjadi prasyarat munculnya fenomena *long-distance marriage* dan konflik *virtual* yang diteliti.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi data melalui tiga metode pengumpulan utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur dilakukan terhadap 20 informan yang terdiri dari istri migran, mantan istri migran yang menjadi pelaku cerai gugat, serta tokoh masyarakat setempat, dengan fokus pada sejarah migrasi keluarga, pola pengambilan keputusan finansial, dan pengalaman konflik emosional yang dimediasi teknologi komunikasi. Kedua, observasi etnografi digital terbatas dilakukan melalui pengamatan partisipatif terhadap interaksi digital informan pada *platform* media sosial untuk mengamati pola

pengawasan (*digital surveillance*), intensitas pertukaran pesan, serta negosiasi kepercayaan lintas batas. Ketiga, analisis dokumen dilakukan terhadap konten dokumen primer berupa salinan putusan perkara perceraian dari Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2024–2025 yang diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung (2024-2025), guna memetakan alasan yuridis dan sosiologis di balik pengajuan cerai gugat yang kemudian dikontekstualisasikan dengan temuan lapangan.

Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan tahapan analisis tematik dari Braun & Clarke (2006). Proses ini meliputi familiarisasi dengan data melalui transkrip wawancara, pemberian kode pada data mentah (*generating initial codes*), pengelompokan kode ke dalam tema-tema besar (*searching for themes*), peninjauan kembali tema untuk memastikan relevansi terhadap fokus penelitian (*reviewing themes*), serta perumusan narasi hasil penelitian melalui pendefinisian dan penamaan tema (*defining and naming themes*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian kualitatif di Desa Kerjo Lor (Kecamatan Ngadirojo) dan Desa Pule (Kecamatan Selogiri) ini mengungkap tiga tema utama mengenai transformasi institusi keluarga migran dan tingginya angka cerai gugat. Pembahasan diintegrasikan untuk menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teoritis Transnasionalisme dan Analisis Peran Gender.

Hasil

- *Transformasi Peran Gender Remittance Empowerment*

Fenomena migrasi sirkuler di Wonogiri telah memicu transformasi peran gender yang fundamental dalam struktur rumah tangga. Peran istri, yang sebelumnya secara tradisional terbatas pada pengelolaan domestik, kini berevolusi menjadi manajer

finansial utama yang memegang kendali penuh atas manajemen remitansi. Pergeseran peran ini mencerminkan adanya *remittance-driven empowerment*, yakni akses terhadap sumber daya ekonomi secara langsung meningkatkan kapasitas agensi perempuan.

Data empiris yang dihimpun dari penelitian mengenai kasus cerai gugat menunjukkan temuan yang signifikan, yaitu 75% dari total kasus diajukan oleh pihak istri. Tingginya angka tersebut mengindikasikan adanya pergeseran daya tawar (*bargaining power*) perempuan yang cukup tajam. Dalam konteks ini, konflik domestik yang berujung pada gugatan cerai sering kali bersumber dari perselisihan terkait pengelolaan remitansi serta krisis kepercayaan (*distrust*) dalam manajemen finansial rumah tangga.

Secara teoritis, pola migrasi tenaga kerja khususnya ketika suami berperan sebagai migran telah mengubah konfigurasi aktor dan struktur ekonomi keluarga. Perubahan ini secara fundamental memengaruhi dinamika kekuasaan (relasi kuasa), peran gender, serta stabilitas pernikahan. Akumulasi dari pergeseran tersebut pada akhirnya membentuk lanskap sosial baru di komunitas asal migran, yang menjadikan otonomi finansial istri menjadi faktor determinan dalam menentukan keberlangsungan ikatan perkawinan.

- Perubahan Aktor Ekonomi dan Otonomi Finansial Istri

Fenomena migrasi tenaga kerja yang dilakukan oleh suami membawa implikasi transformatif terhadap struktur ekonomi rumah tangga, terutama dalam bentuk munculnya otonomi finansial bagi istri yang ditinggalkan. Pergeseran ini secara drastis mengubah posisi tawar perempuan, baik dalam lingkup domestik maupun partisipasi sosial di masyarakat.

Penerimaan dan pengelolaan remitansi memberikan legitimasi bagi istri untuk memegang kendali penuh atas alokasi sumber daya ekonomi keluarga. Otonomi finansial tersebut kemudian berimplikasi pada

peningkatan otoritas pengambilan keputusan yang signifikan. Istri bukan lagi sekadar menjadi pengelola rumah tangga, melainkan bertindak sebagai pengambil keputusan strategis dalam ranah domestik, seperti pendidikan anak dan pengelolaan aset, hingga ranah publik, termasuk keputusan investasi dan keterlibatan dalam kegiatan sosial.

Lebih jauh, kemandirian ekonomi ini berfungsi sebagai instrumen bagi istri untuk menuntut transparansi serta akuntabilitas suami di perantauan terkait manajemen dan distribusi remitansi. Kekuatan ekonomi baru ini secara fundamental mereduksi ketergantungan tradisional istri terhadap suami, yang pada gilirannya menciptakan ruang bagi mereka untuk meninjau kembali integritas hubungan perkawinan.

Dalam beberapa kasus, otonomi finansial menjadi faktor penentu yang mendasari keberanian istri untuk melakukan tindakan radikal, yaitu pengajuan cerai gugat sebagai upaya mengakhiri pernikahan yang tidak memuaskan. Sebagaimana diungkapkan oleh Informan P: “Dulu, keterbatasan ekonomi membatasi ruang gerak kami. Namun, saat ini kendali atas remitansi berada sepenuhnya di tangan saya. Kemandirian finansial ini memberikan proteksi ekonomi sehingga ketika terjadi ketidakselarasan dalam perkawinan baik terkait perilaku suami maupun ketidakstabilan pengiriman uang, saya memiliki kapasitas mandiri untuk menjamin kesejahteraan diri dan anak-anak, termasuk keberanian untuk menempuh jalur hukum guna mengakhiri relasi yang tidak lagi fungsional.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemandirian finansial telah mengubah orientasi istri dari subjek yang bergantung secara ekonomi menjadi aktor yang memiliki daya tawar tinggi. Kondisi ini memungkinkan perempuan untuk mengambil keputusan otonom demi kesejahteraan pribadi dan keluarga, bahkan ketika keputusan tersebut membawa konsekuensi pada pembubaran ikatan perkawinan.

- Degradasi Status dan Ketegangan Peran Suami di Ranah Domestik

Sejalan dengan peningkatan otoritas finansial istri, fenomena migrasi tenaga kerja juga berimplikasi pada pergeseran status dan peran suami yang tinggal di daerah asal (*non-migrant husbands*). Peralihan fungsi pencari nafkah utama kepada istri melalui remitansi secara struktural mengubah pola relasi domestik dan memosisikan suami dalam ruang lingkup peran yang berbeda.

Dalam konteks ini, suami sering kali mengalami transisi peran menjadi apa yang secara sosiologis diidentifikasi sebagai “suami panggul” sebuah terminologi lokal yang merujuk pada suami yang memikul tanggung jawab penuh atas tugas-tugas domestik harian serta pengasuhan anak. Kehilangan predikat sebagai penyedia nafkah utama kerap memicu rasa inferioritas yang signifikan. Kondisi ini terefleksi dalam narasi Informan Q: “Pendelegasian tugas domestik, mulai dari pengasuhan anak hingga pengelolaan lahan pertanian, berada di bawah kendali saya. Namun, otoritas finansial sepenuhnya dipegang oleh istri. Ketergantungan ekonomi ini membatasi otonomi individu saya, bahkan untuk kebutuhan personal yang minimal. Ketimpangan relasi kuasa yang timbul akibat dominasi finansial istri sering menjadi sumber konflik, terutama karena persepsi mengenai penurunan status saya sebagai kepala keluarga.” Dinamika ini menunjukkan adanya ketegangan peran (*role strain*) yang substansial. Ketidakseimbangan antara beban domestik yang dipikul suami dengan minimnya akses terhadap kendali ekonomi menciptakan gesekan yang mendasari konflik domestik berkelanjutan.

Secara teoretis, temuan ini mengafirmasi perspektif Teori Peran Gender (Giddens, 1990) dalam konteks migrasi sirkuler. Remitansi berfungsi sebagai katalisator sosial yang memperkuat modal ekonomi istri, yang kemudian ditransformasikan menjadi daya tawar (*bargaining power*) dan keberdayaan sosial

(*remittance empowerment*). Ketika istri memiliki otonomi finansial, norma patriarki tradisional sering mengalami renegotiasi. Akibatnya, istri memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan rasional termasuk pilihan perceraian sebagai respons terhadap ketimpangan peran, keterasingan emosional, maupun krisis kepercayaan. Fenomena ini merupakan bentuk negosiasi ulang peran gender yang radikal dalam ruang lingkup rumah tangga transnasional.

- Teknologi Komunikasi Digital Surveillance

Teknologi komunikasi memainkan peran ganda yang kontradiktif dalam dinamika rumah tangga migran di Wonogiri. Meskipun teknologi berfungsi sebagai instrumen vital untuk menjaga kohesi emosional dalam pernikahan jarak jauh, penggunaannya sering kali memicu beban emosional baru yang memicu konflik interpersonal. Praktik komunikasi intensif, yang pada dasarnya ditujukan untuk meminimalisasi jarak fisik, justru berpotensi menjadi pemicu kecurigaan kronis (Hadi & Pratama, 2025).

Dalam praktiknya, teknologi komunikasi kerap dialihfungsikan sebagai instrumen pengawasan digital (*digital surveillance*). Perantau sering melakukan pengawasan ketat sebagai mekanisme kompensasi atas keterpisahan fisik yang pada gilirannya menjadi determinan utama dalam erosi kepercayaan (*trust erosion*) dalam rumah tangga migran (Rahmawati et al., 2025). Kondisi ini tercermin dalam kesaksian Informan R: “Intensitas komunikasi melalui video call menjadi tuntutan wajib setiap malam. Keterlambatan dalam merespons panggilan sering kali diinterpretasikan sebagai indikasi ketidaksetiaan. Tuntutan untuk membagikan lokasi secara waktu nyata (*live location*) setiap hari menciptakan ruang privasi yang semakin tergerus. Fenomena ini telah mengubah esensi pernikahan jarak jauh menjadi praktik *long distance* monitoring yang pada akhirnya menjadi pemicu utama

saya dalam mengambil keputusan untuk bercerai.”

Ketegangan ini mengindikasikan bahwa jarak fisik telah menciptakan defisit kepercayaan (*trust deficit*) yang kemudian diisi oleh praktik pengawasan digital yang obsesif. Konflik yang muncul tidak lagi terbatas pada ranah fisik-lokal, tetapi bertransformasi menjadi konflik trans-lokal dan virtual yang melampaui kapasitas mediasi berbasis norma tradisional.

Temuan ini secara konseptual memperluas kerangka Transnasionalisme (Levitt & Jaworsky, 2007) dengan memberikan penekanan pada kerapuhan infrastruktur emosional dalam ruang sosial transnasional. Penggunaan teknologi yang tidak berbasis pada rasa saling percaya justru mempercepat disintegrasi hubungan yang menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam rumah tangga migran memerlukan keseimbangan antara kebutuhan akan konektivitas dan penghormatan terhadap otonomi individu.

- Kegagalan Mediasi Lokal dan Implikasi Kebijakan Sosial

Dinamika rumah tangga migran telah memberikan beban baru terhadap efektivitas mekanisme mediasi formal maupun non-formal di tingkat desa. Lembaga-lembaga lokal kini menghadapi tantangan kompleks dalam menangani sengketa perkawinan yang dipicu oleh kompleksitas ruang transnasional. Situasi ini diperburuk oleh pergeseran orientasi nilai di kalangan generasi muda yang memandang perceraian sebagai sebuah langkah rasional untuk mengakhiri relasi yang disfungsi, alih-alih sebagai aib sosial yang harus dihindari.

Problematisa yang muncul sering melibatkan variabel-variabel yang berada di luar jangkauan yurisdiksi perangkat desa, seperti keterlibatan pihak ketiga di lokasi perantauan atau konflik berbasis *virtual*. Ketidakmampuan otoritas desa untuk menjangkau aktor yang berada di luar wilayah domestik membatasi ruang gerak mediasi. Seperti yang diungkapkan oleh Informan S:

“Kami sering kali mengalami kendala dalam memediasi konflik yang berakar pada masalah digital, seperti sengketa terkait pelacakan lokasi (*live location*) atau interaksi daring dengan pihak ketiga di luar negeri. Keterbatasan kewenangan kami untuk memanggil pihak yang berada di perantauan menyebabkan upaya resolusi konflik di tingkat desa menjadi tidak efektif sehingga kami hanya dapat mengarahkan para pihak untuk menempuh jalur litigasi di Pengadilan Agama.”

Keterbatasan mediasi lokal ini mengakibatkan eskalasi sengketa domestik secara cepat ke ranah hukum formal. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran urgensi dari dimensi ketahanan ekonomi menuju ketahanan emosional dan relasional. Hal ini menuntut adanya reorientasi dalam kebijakan sosial agar lebih adaptif terhadap realitas kehidupan keluarga migran di era digital. Kebijakan yang responsif tidak hanya harus berfokus pada pemberdayaan ekonomi, tetapi juga perlu mencakup intervensi psikososial yang mampu menavigasi dinamika relasi dalam ruang virtual yang transnasional.

Pembahasan

Pembahasan ini mengintegrasikan temuan empiris dari studi kasus di Wonogiri dengan dua kerangka teoretis utama Transnasionalisme dan Teori Peran Gender guna menjelaskan kompleksitas di balik tingginya angka cerai gugat dalam keluarga migran sirkuler.

- Transnasionalisme dan Kritik Terhadap Paradigma "Triple Win"

Temuan bahwa keluarga migran Wonogiri tetap terikat melalui remitansi dan komunikasi digital secara eksplisit mendukung konsep Transnasionalisme (Levitt & Jaworsky, 2007) yang melihat unit keluarga sebagai ruang sosial transnasional yang tidak terputus oleh batas geografis (Portes, 2001). Model migrasi sirkuler sering dipromosikan sebagai solusi "*Triple Win*" (Wickramasekara, 2012). Namun, penelitian

ini menawarkan kritik terhadap narasi transnasionalisme yang didominasi oleh ekonomi dengan menyoroti kerapuhan infrastruktur emosional dari ruang sosial tersebut. Remitansi memang menjembatani kesenjangan ekonomi (Dustmann & Görlach, 2015), tetapi gagal menjembatani defisit kepercayaan (*trust deficit*) dan kesenjangan kehadiran emosional.

Remitansi menciptakan keterikatan timbal balik suami terikat kewajiban finansial, sementara istri terikat tanggung jawab pengelolaan dana. Keterikatan ini bersifat fungsional, tetapi rapuh secara relasional. Konflik yang terjadi tidak lagi bersifat lokal, tetapi trans-lokal, yakni masalah di tempat rantau (misalnya dugaan perselingkuhan atau judi *online* suami) secara instan memengaruhi kehidupan di Desa Kerjo Lor atau Pule, dan sebaliknya. Kegagalan lembaga lokal untuk mengatasi konflik trans-lokal ini menjadi bukti bahwa institusi mediasi tradisional belum siap beroperasi dalam ruang transnasional yang dimediasi teknologi.

- Negosiasi Ulang Peran Gender dan Manifestasi Remittance Empowerment

Temuan mengenai peningkatan otonomi ekonomi dan daya tawar istri merupakan manifestasi nyata dari negosiasi ulang peran dalam bingkai Teori Peran Gender (Giddens, 1990). Penguasaan atas remitansi memberikan istri modal ekonomi yang secara strategis dikonversi menjadi modal sosial dan keberdayaan (*power*). Peran ganda sebagai pengelola domestik sekaligus manajer finansial menempatkan istri pada posisi yang lebih dominan dalam hierarki pengambilan keputusan keluarga. Sejalan dengan temuan Sari dan Wijaya (2025), fenomena ini secara radikal merestrukturisasi relasi kuasa di tingkat rumah tangga.

Di sisi lain, degradasi status suami menjadi “suami panggul” menciptakan ketimpangan ekspektasi yang memperburuk ketidakpuasan relasional. Istri yang telah mencapai kemandirian finansial cenderung menuntut lebih dari sekadar dukungan

ekonomi. Mereka mengedepankan kualitas kehadiran emosional dan transparansi perilaku. Ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi terutama dalam konteks pengawasan digital (*digital surveillance*) yang berlebihan istri tidak lagi merasa perlu menoleransi pernikahan yang disfungsional.

Hal ini merefleksikan pergeseran paradigma perceraian di Wonogiri, yang memandang tindakan cerai gugat kini sebagai langkah rasional untuk menegaskan otonomi diri, bukan lagi sekadar aib sosial. Transformasi pola pikir ini selaras dengan dinamika peran yang ditemukan dalam studi keluarga migran sirkuler lainnya (Yulianto & Furqan, 2022) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi determinan utama dalam mendefinisikan ulang keberlangsungan ikatan perkawinan di tengah tantangan migrasi.

- Paradoks Teknologi

Digital surveillance menjadi aspek paling ironis dalam temuan ini. Praktik komunikasi digital dalam pernikahan jarak jauh sering kali menciptakan beban emosional baru yang memicu konflik interpersonal. Frekuensi komunikasi yang tinggi justru memicu kecurigaan kronis. Teknologi komunikasi yang seharusnya menjadi perekat dalam *long-distance marriage* justru dieksploitasi sebagai alat verifikasi kesetiaan. Praktik *digital surveillance* kerap menjadi sumber utama erosi kepercayaan dalam rumah tangga migran. Ketika istri mempersepsikan praktik ini sebagai bentuk pelanggaran privasi atau kekerasan psikologis jarak jauh, hal tersebut diterjemahkan sebagai alasan sah perselisihan dan pertengkaran di pengadilan. Studi ini menekankan bahwa kegagalan literasi digital beretika menjadi faktor pemicu konflik relasional utama yang dampaknya melebihi masalah ekonomi.

- Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Dari temuan penelitian ini Pemerintah Daerah Wonogiri didesak untuk melakukan pergeseran paradigma intervensi sosial yakni

dari fokus pada penanggulangan kemiskinan yang secara empiris telah terbantu oleh remitansi menuju penguatan ketahanan keluarga dalam era digital. Berdasarkan kompleksitas konflik yang bersifat trans-lokal dan berbasis pada defisit kepercayaan emosional, direkomendasikan langkah-langkah kebijakan strategis seperti berikut: 1) Pemerintah daerah perlu mengalihkan fokus program penyuluhan dari sekadar pelatihan keterampilan ekonomi ke arah manajemen ekspektasi peran dalam *long-distance marriage*. Hal ini penting untuk menyelaraskan persepsi antara suami dan istri mengenai tanggung jawab domestik dan beban finansial untuk meminimalkan rasa inferioritas atau beban kerja berlebih yang memicu ketegangan relasional. 2) Perlu adanya kurikulum khusus dalam bimbingan pranikah dan pasca-nikah bagi keluarga migran yang menekankan pada etika penggunaan media sosial. Materi ini harus secara eksplisit mencakup batasan privasi, pemahaman mengenai dampak psikologis dari *digital surveillance*, serta pentingnya membangun komunikasi sehat yang berbasis pada rasa saling percaya (*trust-building*), alih-alih pengawasan yang bersifat koersif. 3) Karena keterbatasan otoritas perangkat desa dalam menangani konflik virtual, pemerintah desa perlu membentuk unit mediasi trans-lokal yang terakreditasi. Unit ini diharapkan mampu memfasilitasi proses mediasi jarak jauh melalui kanal komunikasi resmi (*video call*) yang diakui secara administratif. Pendekatan ini bertujuan untuk meredam eskalasi konflik di tingkat komunitas sebelum masalah tersebut masuk ke ranah yuridis formal di Pengadilan Agama. 4) Pemerintah Daerah harus mulai mengintegrasikan data tren konflik *virtual* ke dalam perencanaan kebijakan sosial agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran terhadap dinamika keluarga muda, termasuk Generasi Z yang memandang perceraian sebagai solusi rasional terhadap hubungan yang tidak memberikan kepuasan emosional.

SIMPULAN

Berdasarkan data lapangan yang dianalisis secara interpretatif terhadap dinamika keluarga migran di Desa Kerjo Lor dan Desa Pule, Kabupaten Wonogiri, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Migrasi sirkuler telah memicu transformasi peran gender yang paling dasar. Istri bertransformasi menjadi manajer finansial utama yang memegang kendali atas remitansi. Peningkatan otonomi ekonomi ini secara signifikan mengubah daya tawar (*bargaining power*) istri sehingga ketika terjadi ketidakharmonisan, istri memiliki keberanian untuk mengambil keputusan rasional berupa Cerai Gugat. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan finansial istri, sebagaimana dipahami dalam kerangka Teori Peran Gender, menjadi faktor penentu dalam memutuskan rantai pernikahan yang dianggap tidak lagi memberikan dukungan emosional yang memadai.
2. Keluarga migran di Wonogiri beroperasi dalam ruang sosial transnasional yang rentan secara emosional. Teknologi komunikasi memicu paradoks yang mendalam, yaitu di satu sisi menjadi jembatan kohesi, tetapi di sisi lain sering dieksploitasi untuk praktik *digital surveillance*. Praktik pengawasan digital ini menciptakan defisit kepercayaan kronis yang menjadi pemicu utama perselisihan, sekaligus mendegradasi privasi individu menjadi konflik relasional yang sulit dimediasi.
3. Lembaga mediasi tradisional di tingkat desa saat ini tidak memiliki kapasitas dan otoritas untuk menyelesaikan konflik yang bersifat trans-lokal maupun virtual. Ketidadaan mekanisme penanganan konflik berbasis teknologi menyebabkan kasus perceraian langsung tereskalasi ke Pengadilan Agama sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang berfokus pada penguatan ketahanan keluarga transnasional berbasis literasi digital beretika.

SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, disampaikan beberapa saran strategis kepada para pemangku kepentingan untuk menekan angka kerentanan keluarga migran sirkuler di Kabupaten Wonogiri dan wilayah serupa sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah (Dinas Sosial dan Dinas PPKB)
 - a. Melakukan reorientasi program ketahanan keluarga dengan mengalihkan fokus dari penanggulangan kemiskinan ekonomi (yang telah teratasi melalui remitansi) menuju penguatan ketahanan relasional dan kesehatan mental berbasis keluarga digital.
 - b. Mengintegrasikan modul wajib dalam bimbingan pranikah dan pascanikah yang secara spesifik membahas manajemen ekspektasi peran domestik, etika komunikasi digital, serta mitigasi risiko digital *surveillance*.
 - c. Menyediakan layanan konseling keluarga yang dapat diakses secara daring bagi pasangan migran untuk memediasi konflik emosional sebelum eskalasi ke jalur hukum.
2. Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat
 - a. Membentuk pusat mediasi tingkat desa yang menyediakan protokol mediasi jarak jauh melalui kanal komunikasi resmi. Fasilitas ini bertujuan untuk menjembatani konflik yang melibatkan perantau dengan pasangan di desa sehingga perselisihan dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus langsung menempuh jalur litigasi di Pengadilan Agama.
 - b. Tokoh masyarakat dan agama perlu mengampanyekan konsep bahwa

teknologi ponsel adalah alat koneksi, bukan instrumen kontrol (pengawasan), untuk membangun kembali kepercayaan (*trust*) di tengah jarak fisik yang memisahkan pasangan.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini terbatas pada sudut pandang keluarga di Wonogiri. Penelitian selanjutnya perlu memasukkan perspektif migran di tempat perantauan serta melakukan studi perbandingan dengan daerah migran sirkuler lainnya untuk memperkuat generalisasi temuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terwujudnya penelitian ini kepada:

1. Informan di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, dan Desa Pule, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, yang telah dengan tulus dan terbuka berbagi pengalaman pribadi yang mendalam.
2. Pemerintah Kabupaten Wonogiri, khususnya perangkat desa di lokasi penelitian, atas izin dan bantuan fasilitas selama proses pengumpulan data di lapangan.
3. Pengadilan Agama Wonogiri atas penyediaan data sekunder yang krusial bagi analisis tren perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, B., & Setiawan, A. (2024). The Paradox of Digital Connection: Long-Distance Marriages and the Rise of Digital Surveillance.

- Contemporary Social Research*, 15(2), 112–130.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- De Haas, H. (2021). A theory of migration: the aspirations-capabilities framework. *Comparative Migration Studies*, 9(1).
<https://doi.org/10.1186/s40878-020-00210-4>
- Diah, M. P. (2020). Pembangunan Pedesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa Dan Kota Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Public Administration Journal Of Research*, 2(2), 165–173.
<https://doi.org/10.33005/Paj.V2i2.45>
- Dustmann, C., & Görlach, J.-S. (2015). Discussion Paper Series The Economics of Temporary Migrations. CREAM-Discussion Paper Series, CPD 03/15.
- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Stanford university press.
- Hadi, S., & Pratama, A. (2025). Navigating Digital Intimacy: Communication Practices and Marital Conflicts Among Indonesian Migrant Families. *International Journal of Sociology of the Family*, 51(2), 112–135.
- Hugo, G. (2002). Effects of international migration on the family in Indonesia. *Asian and Pacific Migration Journal*, 11(1), 13–43.
- Kartini, A., & Maulana, A. (2019). Redefinisi Gender Dan Seks. An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman, 12(2).
<https://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.18>
- Khoiriyah. (2023). Remitansi untuk Hidup di Desa Kayupuring, Petungkriyono, Pekalongan. *Lembaran Antropologi*, 2(1).
<https://doi.org/10.22146/la.4227>
- Levitt, P., & Jaworsky, B. N. (2007). Transnational migration studies: Past developments and future trends. *Annual Review of Sociology*, 33, 129–156.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023-2025). *Direktori Putusan Pengadilan Agama Wonogiri*. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Mantra, (2013). *Demografi Umum*. Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Portes, A. (2001). The study of transnationalism: Pitfalls and promise of an emergent research field. *Ethnic and Racial Studies*, 22(2), 217–237.
- Radar Solo. (2023, 13 Juli). Sering Bertengkar, 908 Pasutri di Wonogiri Ajukan Cerai di Semester I Tahun 2023. Radar Solo.
- Rahmawati, Y., et al. (2025). Digital Surveillance and Trust Dynamics in Long-Distance Marriages: A Qualitative Study. *Journal of Digital Media & Policy*, 16(1), 22–40.
- Sari, R. P., & Wijaya, H. (2025). Shifting Gender Roles in Migrant Households: Remittances, Autonomy, and Divorce Trends in Indonesia. *International Journal of Migration and Society*, 7(3), 201–222.
- Wickramasekara, P. (2012). Circular Migration: A Triple Win or a Dead End. SSRN Electronic Journal.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1834762>
- Yulianto, F., & Furqan, M. (2022). Pekerja Migran Sirkuler Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga Di Desa Ngembah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Jurnal Al-Ijtimaïyyah, 8(1).
<https://doi.org/10.22373/Al-Ijtimaïyyah.V8i1.13024>

